

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa individu yang bergabung pada satu jenis organisasi memiliki tingkat keterlibatan politik yang berbeda dengan individu pada jenis organisasi lainnya. Bab ini mengungkapkan penjelasan mengenai organisasi, dimensi-dimensi dan jenis-jenisnya; konstruk keterlibatan politik (*political engagement*), dinamika jenis organisasi dengan konstruk keterlibatan politik tersebut, serta berbagai hasil penelitian mengenai hal tersebut.

2.1. Organisasi

2.1.1. Pengertian dan Dimensi Organisasi

Organisasi merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang saling memiliki ketertarikan dan mempunyai tujuan yang sama (Drafke & Kossen, 2002). Dalam Munandar (2001), Tossi, Rizzo, dan Carroll (1994) menyatakan bahwa organisasi merupakan “. . . *a group of people, working toward objectives, which develops and maintains relatively stable and predictable behavior patterns, even though the individuals in the organization may change.*” Dalam hal ini Robbins (1994) mengungkapkan definisi organisasi yang lebih kompleks, menurutnya, “Organisasi adalah sebuah kesatuan sosial yang dikoordinasi secara bebas dengan batas yang relatif dapat diidentifikasi, yang berfungsi atas dasar yang relatif berkesinambungan untuk mencapai suatu atau sejumlah tujuan bersama.”

Dalam beberapa definisi organisasi di atas, disebutkan bahwa organisasi merupakan kumpulan dua orang atau lebih. Kumpulan ini harus memiliki tujuan bersama dan melakukan kerja sama untuk mewujudkan tujuan tersebut, hal ini yang menjadi pembeda antara organisasi dengan sekumpulan orang. Misalnya, orang-orang yang sedang berada di sebuah halte bus merupakan sekelompok orang yang berada di suatu tempat, namun tidak memiliki tujuan yang sama, bisa jadi ada orang yang sedang menunggu kendaraan umum tapi ada juga orang yang sekedar berteduh. Kalaupun sekelompok orang tersebut memiliki tujuan yang

sama untuk menunggu kendaraan umum, namun mereka tidak melakukan interaksi dan kerja sama satu sama lain sehingga sekelompok orang ini tidak dapat dikatakan sebagai sebuah organisasi. Apabila kemudian orang-orang dalam halte tersebut saling berinteraksi dan memutuskan untuk bekerja sama mencari satu kendaraan tertentu, maka sekelompok orang ini telah berubah menjadi sebuah organisasi sederhana. Dengan demikian, kerja sama dan tujuan bersama merupakan indikator yang membedakan organisasi dengan sekumpulan orang.

Organisasi terbentuk atas dasar kebutuhan tiap anggotanya yang termanifestasi dalam tujuan organisasi. Organisasi yang masih sederhana biasanya juga memiliki tujuan yang sederhana, tujuan ini dapat berkembang sehingga kompleksitas kerja dalam organisasi tersebut akan bertambah dan organisasi pun turut berkembang. Ada kalanya ketika tujuan dan kompleksitas organisasi menjadi berkembang, individu di dalamnya merasa bahwa kebutuhannya tidak dapat terwujud lagi dalam tujuan organisasi tersebut sehingga ia dapat meninggalkan organisasi dan mencari organisasi lain yang lebih sesuai untuknya. Organisasi tersebut dapat tetap berjalan dan kerja sama orang-orang di dalamnya dapat terus dilakukan untuk memenuhi tujuan organisasi, walaupun para anggotanya terus berganti.

Dalam suatu organisasi, biasanya dilakukan pembagian kerja agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif. Meskipun demikian, kerja sama harus terus dilakukan agar setiap kerja yang dilakukan tetap sesuai dengan tujuan organisasi. Pengontrolan atas pembagian kerja dan kesinambungan kerja tiap anggota dengan tujuan organisasi biasanya dilakukan oleh pemimpin organisasi tersebut. Organisasi yang masih sederhana biasanya hanya memiliki satu pemimpin dengan satu komando, namun dalam organisasi yang lebih kompleks, komando organisasi dapat saja berada pada beberapa orang secara sinergis.

Kompeksitas dan sentralisasi komando organisasi menjadi dua diantara tiga dimensi organisasi. Dalam Munandar (2001), Tossi, Rizzo, dan Carroll (1994) menyebutkan tiga dimensi yang terdapat dalam organisasi, yaitu kemajemukan (*complexity*), formalisasi (*formalization*), dan sentralisasi (*centralization*). Robbins (1994) menamakan ketiga dimensi ini sebagai struktur

organisasi. Ketiga dimensi ini lah yang dapat menjadi indikator pembeda antara satu jenis organisasi dengan jenis yang lain.

Kemajemukan merujuk pada tingkat pembagian kerja yang ada di dalam sebuah organisasi (Robbins, 1994), sementara Munandar (2001) menjelaskan bahwa kemajemukan tersebut berkaitan dengan beragamnya kegiatan, fungsi, pekerjaan, dan jumlah lapis organisasi. Organisasi dengan tujuan yang sederhana biasanya memiliki kegiatan kerja yang homogen sehingga belum memerlukan pembagian kerja spesifik, hal ini membuat tingkat kemajemukan organisasi menjadi sederhana pula. Sementara organisasi yang memiliki kegiatan yang lebih banyak dengan tujuan yang lebih kompleks biasanya memiliki pembagian kerja yang terstruktur, dan kadang berlapis sehingga dapat dikatakan bahwa organisasi ini lebih majemuk karena memiliki struktur dan pembagian kerja yang lebih kompleks.

Pembagian kerja dalam suatu organisasi yang majemuk akan membutuhkan aturan-aturan atau prosedur yang jelas agar setiap kerja yang dilakukan dalam bagian-bagian organisasi dapat berjalan secara berkesinambungan. Biasanya terdapat uraian kerja yang eksplisit sehingga tiap anggota organisasi akan bekerja berdasarkan uraian kerja tersebut. Menurut Robbins (1994), prosedur atau standardisasi yang terdapat dalam suatu organisasi menunjukkan tingkat keformalan suatu organisasi, makin banyak prosedurnya maka tingkat keformalan organisasi tersebut akan semakin tinggi, sebaliknya organisasi yang tingkat formalitasnya rendah biasanya tidak memiliki banyak prosedur atau aturan bagi para anggotanya. Prosedur, kebijakan, atau aturan yang membatasi organisasi merujuk pada dimensi kedua dalam organisasi, yaitu formalisasi (Munandar, 2001).

Dimensi ketiga dalam organisasi adalah pemusatan atau *centralization* yang merujuk pada penyebaran dari daya (*power*) dan wewenang (*authority*). *Power* dan *authority* adalah bentuk komando atau kontrol dalam organisasi yang dilakukan oleh pimpinan organisasi yang diklasifikasikan pada dua jenis, yaitu organisasi dengan kontrol yang terpusat (*centralized organization*), dan kontrol yang tersebar (*decentralized organizations*). “Pada *centralized organizations*,

daya dan wewenang ada pada kedudukan tinggi dalam organisasi. . . Pada *decentralized organizations*, hak dan tanggung jawab mengambil keputusan didelegasikan ke tingkat-tingkat lebih rendah dari organisasi” (Munandar, 2001).

Kemajemukan, formalisasi, dan sentralisasi berkaitan erat satu sama lain. Organisasi yang majemuk biasanya memiliki prosedur yang lebih banyak sehingga memiliki formalitas yang lebih tinggi, serta memiliki pembagian kerja yang lebih kompleks sehingga daya (*power*) dan wewenang (*authority*) yang terdapat pada organisasi dibuat tersebar (*desentralized*) untuk menyederhanakan kontrol atas pembagian kerja tersebut. Sebaliknya, organisasi dengan tujuan yang dan pembagian kerja sederhana, biasanya tidak memiliki banyak aturan bagi para anggotanya sehingga kontrol atas kerja para anggota pun dilakukan oleh satu orang saja (*centralized*).

2.1.2. Pembagian Organisasi Berdasarkan Dimensi Organisasi

Tiga dimensi organisasi yang meliputi kemajemukan (*complexity*), formalisasi (*formalization*), dan sentralisasi (*centralization*) dapat menjadi indikator pembeda antara satu jenis organisasi dengan organisasi lainnya. Jenis organisasi tersebut dapat dilihat berdasarkan aspek struktural atau desainnya (Munandar, 2001).

Berdasarkan aspek struktural, organisasi dibedakan menjadi organisasi formal dan informal. “Kelompok formal dibatasi oleh struktur organisasi yang berisi rincian tugas-tugas dan tanggung jawab tertentu, yang pelaksanaannya akan menuju tercapainya sasaran dan misi keseluruhan organisasinya. . . Kelompok informal tidak diberi batasan oleh struktur organisasi dan terjadi secara spontan antara sejumlah tenaga kerja, sebagai jawaban terhadap kebutuhan tertentu dari mereka” (Munandar, 2001).

Organisasi formal cenderung memiliki berbagai aturan dan prosedur kerja yang jelas bagi anggotanya, sehingga memiliki kemajemukan dan formalisasi yang tinggi. Pembagian kewenangan dan kekuasaannya pun biasanya dipecah berdasarkan kelompok kerja yang ada sehingga sentralisasi kekuasaannya tersebar (*desentralized organization*). Sementara organisasi informal biasanya tidak

memiliki banyak aturan bagi para anggotanya (formalisasinya rendah), tidak membutuhkan banyak pembagian kerja (tidak majemuk), dan kontrol langsung ada di tangan pimpinan organisasi (*centralized organization*). Organisasi informal ini dapat dibedakan ke dalam kelompok minat atau kepentingan yang bergabung dalam organisasi karena memiliki minat yang sama, dan kelompok persahabatan yang berkelompok merasa saling tertarik, saling cocok dengan ciri serta sifat yang dimiliki masing-masing, dan melakukan tujuan bersama atas dasar kecocokan sifat tersebut.

Berdasarkan rancangan desainnya, organisasi dapat dibedakan menjadi organisasi sederhana, birokrasi, dan matriks (Munandar, 2001). Desain sederhana ditandai dengan “*departementalization* yang sedikit, *span of control* yang lebar, kewenangan yang terpusat pada satu orang” (Munandar, 2001). Hal ini berarti bahwa organisasi sederhana memiliki tingkat kemajemukan yang rendah karena tidak memiliki pembagian kerja (*departementalization*) yang banyak, tidak banyak memiliki aturan (*span of control*-nya lebar) sehingga memiliki tingkat formalitas yang rendah, serta memiliki sentralisasi terpusat.

Desain yang birokratis merupakan desain organisasi dengan pembagian tugas yang sangat spesifik dan rutin, serta membutuhkan spesialisasi keahlian tertentu. Dalam desain yang birokratis, “Kewenangannya terpusat, *span of control* yang sempit, proses pengambilan keputusan mengikuti rantai komando . . . Kekuatan utamanya . . . terletak dalam kemampuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang distandardisasi dengan cara yang sangat efisien.” Dengan demikian, organisasi dengan rancangan yang birokratis memiliki tingkat formalitas yang sangat tinggi karena pembagian kerjanya distandardisasi dengan aturan yang baku dan *span of control* yang sempit. Pengambilan keputusannya mengikuti rantai komando sehingga kekuasaannya terpusat, namun tingkat kemajemukannya bisa tinggi atau rendah. Jika organisasi tersebut memiliki kelompok-kelompok kerja yang beragam dengan spesialisasi keahlian yang spesifik dalam setiap kelompoknya, maka organisasi tersebut memiliki kemajemukan yang tinggi, sebaliknya apabila pembagian kerjanya cenderung homogen maka tingkat kemajemukannya pun rendah.

Desain matriks merupakan desain organisasi dengan pembagian kerja pada kelompok-kelompok kerja secara spesifik berdasarkan keahlian atau minat individu. Dalam desain ini, individu-individu dalam kelompok atau bagian organisasi yang berbeda dapat menghasilkan satu produk atau kegiatan yang sama, sehingga kontrol organisasi pun harus dipecah berdasarkan bagian organisasi tersebut serta berdasarkan kegiatan yang dilakukan atau produk yang dihasilkan. Dengan demikian, desain ini memiliki kemajemukan yang tinggi dengan pembagian kekuasaan yang menyebar (*decentralized organization*). Hal ini menjadi kekuatan desain matriks, selain itu kekuatan organisasi ini terletak pada “. . . kemampuannya untuk melancarkan koordinasi jika organisasi memiliki kegiatan-kegiatan majemuk yang banyak yang saling bergantung” (Munandar, 2001). Sayangnya kemajemukan ini dapat menimbulkan kebingungan dalam proses kerjanya apabila tidak ada prosedur dan aturan yang jelas dalam organisasi tersebut, sehingga organisasi ini memiliki banyak prosedur dan aturan yang menjadikannya sebagai organisasi yang formal.

2.1.3. Organisasi Kemahasiswaan dan Jenis-jenisnya

Di awal kemerdekaan Republik Indonesia, para mahasiswa memiliki minat yang sangat besar terhadap dunia politik dan pembentukan ideologi sehingga muncul lah berbagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki orientasi ideologi tertentu, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dan sebagainya (Suharsih & Wardhana, 2007). Ideologi yang jelas membuat para mahasiswa memiliki prinsip, nilai, serta orientasi ideologi yang kokoh, hal ini mendorong mereka untuk cenderung kritis dan idealis ketika menghadapi berbagai permasalahan sosial.

Kekritisan para mahasiswa tersebut juga berlaku saat mereka berhadapan dengan pemerintah ketika membuat kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, misalnya pada waktu pemerintahan Soekarno mengeluarkan kebijakan moneter di tahun 1965 yang mengkonversi nilai rupiah ke dalam nilai yang baru

sehingga menimbulkan gelombang kepanikan pada masyarakat serta kenaikan tarif kendaraan umum dan bahan pokok hingga 500% (Gie, 1966 dalam Stanley & Santoso, 1999). Permasalahan sosial ini menyinggung nilai-nilai ideologis serta idealisme para mahasiswa sehingga mereka melakukan protes kepada pemerintah melalui berbagai cara, dari mulai membuat tulisan hingga melakukan demonstrasi di jalanan.

Pada masa pemerintahan Orde Lama, kekritisan mahasiswa dan berbagai tindakan protes yang mereka lakukan berhasil mendorong pihak militer untuk menjatuhkan Orde Lama dan membentuk Orde Baru. Namun ternyata hal ini tidak berlaku pada masa pemerintahan Orde Baru ketika pemerintahan ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap bertentangan dengan prinsip ideologis mereka, tahun 1978 melalui Surat Keputusan (SK) No. 0156 /V/ 1978 mengenai Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), Daed Joeseof sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan membekukan organisasi-organisasi tersebut di dalam kampus.

Organisasi-organisasi yang telah dibekukan digantikan keberadaannya oleh organisasi-organisasi baru yang berada langsung di bawah pengawasan pihak rektorat universitas dan didanai oleh rektorat. Organisasi-organisasi ini pun harus steril dari unsur ideologi terutama dalam aspek politik. Mahasiswa menamakan organisasi baru tersebut dengan sebutan organisasi intra-kampus, yang berarti organisasi yang berada di dalam kampus dan diakui oleh rektorat. Para mahasiswa yang tidak setuju dengan konsep ini dan khawatir bahwa ideologi mereka tidak dan berkembang secara bebas memilih untuk meneruskan organisasi lama mereka meskipun tidak diakui di dalam kampus dan tidak mendapatkan berbagai fasilitas dari kampus. Organisasi ideologis yang lingkaran kegiatannya berada di luar kampus ini kemudian disebut sebagai organisasi ekstra-kampus.

Di Universitas Indonesia, para mahasiswa yang menjadi anggota organisasi intra-kampus kemudian berembuk dan sepakat untuk mengadakan musyawarah mahasiswa secara berkala setiap beberapa tahun sekali. Dalam musyawarah ini, dibahas mengenai berbagai aturan bersama yang harus disepakati oleh organisasi-organisasi tersebut, seperti aturan mengenai tugas dan wewenang

setiap organisasi, periodisasi kepemimpinan setiap organisasi serta mekanisme pergantiannya secara umum, pertanggungjawaban seluruh kegiatannya, hubungan organisasi di tingkat fakultas dengan di universitas, dan sebagainya.

Musyawarah mahasiswa yang terakhir diadakan pada tahun 2006 dan dinamakan Musyawarah Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Musyawarah ini menghasilkan beberapa hal, meliputi:

1. Pembentukan wadah seluruh organisasi intra-kampus tingkat universitas yang dinamakan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (IKM UI). Organisasi-organisasi yang berada pada lingkup fakultas tidak termasuk dalam IKM UI, melainkan menjadi bagian dari ikatan keluarga mahasiswa tiap fakultas karena terdapat aturan dan kultur yang berbeda di tiap fakultas.
2. Adanya aturan tertinggi dalam IKM UI yang dinamakan Undang-undang Dasar IKM UI, berisi berbagai aturan yang disepakati bersama oleh seluruh organisasi intra kampus dalam wadah IKM UI untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitasnya (TAP Musyawarah IKM UI Nomor I/Musyawarah IKM UI / 2006)
3. Pengakuan secara tertulis akan keberadaan 2 organisasi utama di IKM UI yang telah terbentuk, meliputi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai lembaga eksekutif mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) sebagai lembaga legislatif mahasiswa; keberadaan dua organisasi utama lain yang saat itu baru akan dibentuk, meliputi Mahkamah Mahasiswa (MM) sebagai lembaga yudikatif (sekarang sudah terbentuk), dan Badan Audit Keuangan (BAK) sebagai lembaga audit (sekarang sudah terbentuk); serta 33 organisasi-organisasi peminatan yang dinamakan Unit Kegiatan Mahasiswa yang berada di bawah koordinasi BEM UI, meliputi AIKIDO UI, Atletik UI, Base ball / Soft Ball UI, Basket UI, Bridge UI, Bulu Tangkis UI, Center for Entrepreneurship Development and Studies (CEDS), English Debating Society (EDS), Hockey UI, Kelompok Studi Mahasiswa Eka Prasetya UI, Keluarga Mahasiswa Buddhis UI, Keluarga Mahasiswa Hindudarma, Keluarga Mahasiswa Katolik UI, Kempo UI,

Liga Tari Krida Budaya UI, Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) UI, Marching Band Madah Bahana UI, Merpati Putih UI, Nuansa Islam Mahasiswa (Salam) UI, Orkes Symphony Mahawaditra UI, Paduan Suara Paragita UI, Persatuan Oikumene UI, Persatuan Sepak Bola UI, Radio Telekomunikasi Cipta UI (RTC UI), Renang UI, Resimen Mahasiswa (Menwa) Wira Makara UI, Sinlamba UI, Suara Mahasiswa (SUMA) UI, Taekwondo UI, Teater UI, Tenis Lapangan UI, Tenis Meja UI, Volley UI (TAP Musyawarah IKM UI Nomor II/Musyawarah IKM UI / 2006).

Dari berbagai seluruh organisasi intra-kampus yang tercatat dalam TAP Musyawarah IKM UI Nomor II/Musyawarah IKM UI / 2006, peneliti mengklasifikasikan organisasi-organisasi tersebut ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Organisasi replikasi pemerintahan

Dalam suatu negara demokratis yang berbentuk republik, biasanya terdapat tiga jenis lembaga negara yang memiliki fungsi berbeda, meliputi lembaga eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan (presiden dan jajaran kabinetnya), lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang, serta lembaga yudikatif sebagai lembaga kehakiman. Pada Musyawarah IKM UI, para mahasiswa bermaksud menerapkan konsep kelembagaan tersebut dalam dunia kemahasiswaan sebagai proses pembelajaran sehingga mereka melakukan replikasi lembaga pemerintahan ke dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan yang memiliki fungsi eksekutif adalah BEM UI, yang memiliki fungsi legislatif adalah DPM UI, sementara fungsi yudikatif dipegang oleh DPM UI. Selain itu, masih ada lembaga kemahasiswaan yang berfungsi sebagai lembaga audit keuangan untuk seluruh organisasi kemahasiswaan di IKM UI, yaitu BAK (Badan Audit Keuangan). Saat ini, seluruh jenis lembaga tersebut telah terbentuk di IKM UI.

2. Organisasi peminatan dalam bidang olah raga

Organisasi peminatan dalam bidang olahraga merupakan organisasi yang mewedahi minat para mahasiswa dalam bidang olahraga tertentu, kegiatannya biasanya berupa latihan olahraga dan partisipasi

dalam pertandingan-pertandingan olahraga tertentu. Organisasi di IKM UI yang termasuk dalam jenis organisasi ini meliputi AIKIDO UI, Atletik UI, Base ball / Soft Ball UI, Basket UI, Bridge UI, Bulu Tangkis UI, Hockey UI, Kempo UI, Merpati Putih UI, Persatuan Sepak Bola UI, Renang UI, Taekwondo UI, Tenis Lapangan UI, Tenis Meja UI, dan Volley UI.

3. Organisasi peminatan dalam bidang seni

Organisasi peminatan dalam bidang seni merupakan organisasi kemahasiswaan di IKM UI yang mewadahi minat mahasiswa dalam bidang seni, kegiatannya berupa latihan seni dan pentas-pentas kesenian. Organisasi dalam bidang seni ini meliputi Liga Tari Krida Budaya UI, Marching Band Madah Bahana UI, Orkes Symphony Mahawaditra UI, Paragita UI, Sinlamba UI, dan Teater UI.

4. Organisasi peminatan dalam bidang religi atau agama

Organisasi peminatan dalam bidang religi atau agama merupakan organisasi kemahasiswaan di IKM UI yang mewadahi minat mahasiswa dalam bidang keagamaan, di IKM UI sendiri terdapat berbagai jenis organisasi keagamaan yang meliputi Keluarga Mahasiswa Buddhis UI, Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma, Keluarga Mahasiswa Katolik UI, Nuansa Islam Mahasiswa (Salam) UI, dan Persatuan Oikumene UI.

5. Organisasi peminatan dalam bidang militer dan pecinta alam

Organisasi peminatan dalam bidang militer dan pecinta alam merupakan organisasi kemahasiswaan di IKM UI yang mewadahi minat mahasiswa dalam bidang militer dan pecinta alam. Di IKM UI, jenis organisasi ini meliputi Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) UI dan Resimen Mahasiswa (Menwa) Wira Makara UI. Meskipun kegiatan utamanya berbeda, namun peneliti mengelompokkan organisasi peminatan di bidang militer dan pecinta alam pada satu kelompok atas dasar kesamaan jenis kegiatan rutin yang berupa olah fisik.

6. Organisasi peminatan dalam bidang studi khusus dan jurnalistik

Jenis organisasi ini merupakan organisasi kemahasiswaan di IKM UI yang mewadahi mahasiswa untuk melakukan studi atau kajian dalam bidang tertentu seperti dalam bidang wirausaha, debat, jurnalistik, dan sebagainya. Organisasi kemahasiswaan dalam bidang studi khusus dan jurnalistik tersebut meliputi Center for Entrepreneurship Development and Studies (CEDS), English Debating Society (EDS), Kelompok Studi Mahasiswa Eka Prasetya UI, Radio Telekomunikasi Cipta UI (RTC UI), dan Suara Mahasiswa (SUMA) UI.

Sementara itu organisasi ekstra-kampus masih berdiri hingga saat ini, namun keberadaannya tidak dapat dideteksi dengan jelas karena tidak pernah ada laporan tertulis mengenai organisasi-organisasi tersebut, terlebih keberadaan organisasi ekstra-kampus di satu universitas bisa berbeda dengan di universitas lain. Misalnya, organisasi ekstra-kampus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang tidak terdapat di Universitas Indonesia, namun ada di Universitas Negeri Jakarta atau universitas-universitas lain.

Dari penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap organisasi ekstra-kampus yang terdapat di UI, tercatat beberapa organisasi ekstra-kampus yang memiliki komisiariat di UI meski pun tidak memiliki sekretariat tetap, yaitu Himpunan Mahasiswa Indonesia Dipo (HMI-Dipo), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Front Aksi Mahasiswa Red (FAM-Red), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

2.2. Keterlibatan Politik (*Political Engagement*)

2.2.1. Pengertian Keterlibatan Politik (*Political Engagement*)

Keterlibatan politik (*political engagement*) merupakan salah satu aspek keterlibatan kewarganegaraan (*civic engagement*) atau keterlibatan seorang individu dalam hal-hal kewarganegaraan, sedangkan aspek lain keterlibatan kewarganegaraan berupa aspek sipil (*civic*) (Adler & Goggin, 2005; Misa, Anderson, & Yamamura, 2005). Perbedaan antara keterlibatan politik dan sipil terletak pada orientasi keduanya, keterlibatan politik berorientasi untuk

mempengaruhi kondisi politik atau kebijakan pemerintah sementara keterlibatan sipil berorientasi untuk mengembangkan kualitas komunitas dan kemasyarakatan melalui kegiatan kerja sukarela, donasi, atau kegiatan lain (Misa, Anderson, & Yamamura, 2005). Meski kegiatan dan intensinya berbeda, kedua dimensi keterlibatan kewarganegaraan ini pada dasarnya merupakan bentuk kepedulian individu sebagai seorang warga negara yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sosial masyarakatnya.

Dalam penelitiannya yang membandingkan tingkat keterlibatan politik pada pria dan wanita, Verba, Buns, dan Scholzman (1997) menyebutkan tiga elemen utama yang menjadi indikator keterlibatan politik, yaitu ketertarikan politik (*political interest*), efikasi politik (*political efficacy*), dan pengetahuan politik (*political knowledge*). Ketiga elemen tersebut dianggap saling berkaitan, individu yang memiliki ketertarikan dan informasi tentang politik, serta memiliki keyakinan (efikasi) bahwa partisipasi politiknya akan berpengaruh terhadap kondisi pemerintahan akan cenderung berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik secara konkrit, misalnya dengan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Selain ketiga elemen tersebut, Verba, Buns, dan Scholzman (1997) menambahkan dua elemen lainnya, yaitu diskusi politik (*political discussion*) dan penggunaan media (*media usage*) sebagai indikator tambahan untuk mengukur tingkat keterlibatan politik seseorang. Verba, Buns, dan Scholzman menjelaskan bahwa kedua indikator terakhir bukan merupakan elemen psikologis melainkan elemen aktivitas politik, namun dapat dimasukkan sebagai indikator keterlibatan politik karena aktivitas politik berkaitan erat dengan ketiga elemen utama keterlibatan politik sebagai bentuk terbuka (*overt*) dari ketiga elemen tersebut.

Penelitian lain yang memasukkan aktivitas politik sebagai salah satu elemen keterlibatan politik dilakukan oleh Solt (2004). Selain menggunakan ketertarikan politik, efikasi politik, dan pengetahuan politik sebagai dimensi-dimensi yang menjadi indikator tingkat keterlibatan politik seseorang, Solt menyertakan juga partisipasi dalam pemilihan umum (*participation in national election*) yang notabene merupakan salah satu bentuk aktivitas politik sebagai tambahan indikator tingkat keterlibatan politik seseorang.

Ketertarikan (*interest*) dan efikasi (*efficacy*) dalam elemen keterlibatan politik yang dikemukakan Verba, Buns, dan Scohlzman (1997) termasuk ke dalam aspek afeksi, sementara elemen pengetahuan (*knowledge*) merupakan aspek kognisi. Elemen-elemen tersebut tidak melibatkan aspek tingkah laku, aspek ini muncul dalam indikator diskusi politik (*political discussion*) dan penggunaan media (*media usage*) sebagai elemen tambahan keterlibatan politik yang dikemukakan Verbam Buns, dan Scholzman, serta dalam elemen partisipasi dalam pemilihan umum yang dikemkakan Solt (2004).

Peneliti melakukan elaborasi terhadap beragam pengertian serta elemen keterlibatan politik di atas, dan kemudian merumuskan keterlibatan politik (*political engagement*) sebagai elemen keterlibatan individu untuk mempengaruhi kondisi politik atau kebijakan pemerintah yang melibatkan elemen ketertarikan (*interest*), efikasi (*efficacy*), pengetahuan (*knowledge*), serta aktivitas (*activity*) sebagai salah satu bentuk kepeduliannya sebagai warga negara. Dari pengertian ini, peneliti membagi keterlibatan politik dalam empat dimensi, meliputi:

1. ketertarikan politik (*political interest*)
2. pengetahuan mengenai politik (*political knowledge*)
3. efikasi politik (*political efficacy*)
4. aktivitas politik (*political activicty*).

2.2.2. Ketertarikan Politik (*Political Interest*)

Stauffer, Michael, dan Reid (2007) menyatakan bahwa langkah pertama untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama para pemilih muda, adalah dengan meningkatkan ketertarikan mereka pada politik. Individu yang memiliki ketertarikan politik akan cenderung melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik seperti mencari informasi politik, mengikuti acara-acara politik di televisi, dsb.

Ketertarikan politik merupakan elemen penting dalam suatu keterlibatan politik, Kittilson dan Schwindt-Bayer (2008) bahkan menyatakan bahwa keterlibatan politik dalam level yang sederhana sekalipun, seperti membicarakan perkembangan isu politik dengan teman, tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki ketertarikan pada politik. Dalam bentuk yang lebih jauh,

ketertarikan pada dunia politik akan dapat membawa individu untuk berpartisipasi dalam ranah politik praktis, misalnya dengan menjadi anggota partai politik, menjadi tim kampanye partai politik peserta pemilu, menencalonkan diri sebagai anggota lembaga legislatif, dsb.

Ketertarikan politik (*political interest*) adalah derajat kepedulian individu terhadap berbagai proses dan isu politik, yang membuatnya berhasrat untuk terus mendapatkan informasi mengenai berbagai proses dan isu tersebut (Stauffer, Michael, dan Reid, 2007). Ketertarikan ini akan membuat seseorang merasa peduli terhadap berbagai situasi politik sehingga membuatnya ingin terus terkoneksi dengan berbagai proses dan isu politik, misalnya melalui surat kabar, obrolan politik, serta melalui berbagai bentuk aktivitas lainnya. Ketertarikan dan kepedulian ini dapat menjadi dorongan awal bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik termasuk dalam proses pemilihan umum.

Salah satu penelitian yang secara langsung mengukur ketertarikan politik dengan partisipasi individu dalam pemilihan umum dilakukan oleh Kennamer (1987) dalam momen pemilihan gubernur di Virginia pada tahun 1985 (dalam Stauffer, Michael, dan Reid 2007). Ia menemukan bahwa secara signifikan, ketertarikan pada politik menjadi prediktor utama terhadap intensi para pemilih untuk menggunakan hak suaranya pada pemilihan gubernur tersebut.

Ketertarikan seseorang pada politik tidak muncul begitu saja. Biasanya ketertarikan pada politik ini muncul sebagai akibat dari interaksi seseorang dengan orang lain atau lingkungan terdekatnya seperti orang tua, teman-teman, sekolah, organisasi, rekan kerja, dan sebagainya, yang banyak berkaitan dengan dunia politik baik secara langsung maupun tidak langsung (Prior, 2009). Individu yang misalnya tumbuh dalam keluarga yang sering mendiskusikan berbagai perkembangan isu sosial dan politik, serta sering berpartisipasi dalam kegiatan politik akan cenderung memiliki ketertarikan politik yang tinggi, ketertarikan ini kemudian dapat mendorongnya untuk melakukan aktivitas politik.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Casciano (2007). Melalui wawancara yang dilakukannya terhadap para respondennya, Casciano menemukan bahwa ketertarikan seseorang pada politik dapat muncul justru setelah ia terlibat dalam

aktivitas politik yang konkrit sehingga Casciano berpendapat bahwa ketertarikan dan aktivitas politik dapat saling mempengaruhi. Dengan demikian, ketertarikan politik dapat muncul melalui interaksi seseorang dengan lingkungannya yang kemudian mendorongnya untuk melakukan aktivitas politik, atau sebaliknya bahwa ketertarikan seseorang terhadap politik muncul akibat aktivitas yang berkaitan dengan politik yang telah dilakukannya.

2.2.3. Pengetahuan Politik (*Political Knowledge*)

Dalam tulisannya, Casciano (2007) menyatakan bahwa keterlibatan individu dalam politik berkaitan erat dengan tingkat pengetahuannya tentang politik. Proporsi umumnya adalah bahwa tingkat pengetahuan individu mengenai pemerintah dan politik akan membawanya pada kesadaran politik (*political awareness*) sehingga semakin besar kemungkinannya untuk terlibat secara aktif dalam politik.

Dalam Stauffer, Michael, dan Reid (2007), Atkinson et. al. (1976) menyatakan bahwa pengetahuan politik dalam konteks kampanye politik pemilihan umum adalah kepemilikan seseorang mengenai berbagai informasi yang akurat tentang para aktor politik, isu, dan kegiatan-kegiatan politik yang relevan dengan kampanye tersebut. Informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kampanye tersebut akan membantu seseorang untuk melakukan analisa dan kemudian menjatuhkan pilihan terhadap para peserta pemilu. Seseorang yang telah menentukan pilihan pada proses pemilihan umum tentu akan terlibat dalam proses pemilihan umum, minimal sebagai pemilih, sementara mereka yang tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai pemilihan umum dan para peserta pemilihan umum cenderung enggan terlibat dalam proses ini.

Dalam konteks yang lebih umum, Carpini dan Keeter (1996) mendefinisikan pengetahuan politik sebagai informasi faktual tentang politik yang tersimpan dalam *long term memory*. Informasi politik tersebut dapat diperoleh dari berbagai media, misalnya media internet, televisi, surat kabar, dari hasil

diskusi, dari orang tua, dsb. Redaksi informasi ditekankan oleh Carpini dan Keeter untuk membedakannya dengan ilmu pengetahuan.

Pengetahuan individu akan perkembangan isu politik berkaitan dengan ketertarikannya pada dunia politik. Individu yang tertarik dan peduli terhadap dunia politik akan banyak berinteraksi dengan berbagai media yang menyediakan informasi mengenai perkembangan isu sosial dan politik, misalnya kolom sosial dan politik pada surat kabar, berita di televisi, dan sebagainya. Berbagai informasi ini akan membuat individu memahami berbagai masalah politik dan membuatnya tahu mekanisme yang dapat ia lakukan sebagai warga negara untuk menyalurkan ketertarikannya pada berbagai masalah politik sehingga ia menjadi terlibat dalam dunia politik. Dengan demikian, secara teoritis pengetahuan memiliki keterkaitan yang signifikan dengan keterlibatan atau partisipasi politik (Carpini & Keeter, 1996 dalam Stauffer, Michael, & Reid, 2007)

2.2.4. Efikasi Politik (*Political Efficacy*)

Efikasi politik atau *political efficacy* dapat diartikan sebagai rasa yakin seseorang bahwa aktivitas atau partisipasi politiknya memiliki pengaruh atau akan berpengaruh suatu saat nanti terhadap berbagai proses politik (McLeod, et al., 1999 dalam Stauffer, Michael, & Reid, 2007). Tidak jauh berbeda, Coleman dalam buku yang disunting Loader (2007) menyatakan bahwa efikasi politik adalah keyakinan individu bahwa secara efektif pemahaman serta aktivitas politiknya akan mampu mempengaruhi proses pemerintahan, dan pemerintah akan merespon terhadap aktivitasnya tersebut.

Casciano (2007) menyatakan bahwa efikasi politik terdiri dari dua jenis, yaitu efikasi internal (*internal efficacy*) dan efikasi eksternal (*external efficacy*). Efikasi internal dapat didefinisikan sebagai keyakinan internal individu bahwa ia dapat mempengaruhi pemerintahan melalui partisipasinya, sementara efikasi eksternal menjadikan pemerintah sebagai sudut pandang utamanya dimana seseorang yakin bahwa pemerintah akan merespon tindakan politiknya. Pendapat Casciano tersebut senada dengan pandangan McLeod, et al. (1999) dalam Mesch

dan Coleman (2007) yang melihat *political efficacy* dari sudut pandang individu sebagai subjek politik dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan.

Keyakinan bahwa partisipasi politik individu dapat mempengaruhi pemerintah tidak lahir begitu saja, biasanya pengalaman lah yang membuat seseorang memiliki *political efficacy* yang tinggi (Downs, 1957 dalam Alison, Michael, & Scott, 2007). Mereka yang tidak melihat efek dari partisipasi mereka terhadap kegiatan politik seperti pemilu biasanya memiliki *political efficacy* yang rendah, sebaliknya mereka yang pernah merasakan bahwa ternyata partisipasi politik mereka dapat mempengaruhi pemerintah akan memiliki keyakinan terhadap setiap aktivitas dan partisipasi politiknya.

Keyakinan seseorang bahwa aktivitas dan partisipasi politiknya bisa membawa pengaruh pada kondisi pemerintahan akan membuat orang tersebut mau terlibat secara politik dalam berbagai proses demokrasi. Mereka yang memiliki keterlibatan politik yang rendah biasanya merasa bahwa partisipasinya dalam proses politik apa pun tidak akan membawa perubahan yang signifikan pada kondisi negaranya, hal ini yang biasanya membawa seseorang pada kondisi apatis. Tidak adanya *political efficacy* pula yang membuat para pemilih di usia 21 tahunan enggan untuk menggunakan hak pilihnya (Shaffer, 1981 dalam Stauffer, Michael, & Reid 2007). Dengan demikian, efikasi politik menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong seseorang terlibat dalam politik.

2.2.5. Aktivitas Politik (*Political Activity*)

Keterlibatan politik masyarakat dapat diukur secara sederhana melalui partisipasi mereka dalam pemilihan umum atau voting (Conway, 1991), meski demikian partisipasi seseorang dalam proses ini bukan satu-satunya bentuk keterlibatan politik (Donovan, Bowler, Hanneman, & Karp, 2004). Keterlibatan politik seseorang tidak hanya berupa aktivitas seseorang dalam masalah-masalah politik praktis, ia tidak harus menjadi anggota parpol untuk dapat disebut memiliki keterlibatan politik, ia pun tidak harus terlibat dalam berbagai kampanye pemilihan umum atau kegiatan-kegiatan politik praktis lainnya.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Misa, Anderson, & Yamamura (2005), seseorang dikatakan memiliki keterlibatan politik apabila ia melakukan kegiatan-kegiatan yang berintensi untuk mempengaruhi kondisi sosial politik atau kebijakan pemerintahnya, baik secara langsung atau pun tidak. Individu dapat menunjukkan keterlibatan politiknya melalui kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan politik praktis, misalnya berdiskusi dengan orang-orang terdekatnya, membuat tulisan di surat kabar, membuat petisi bersama kelompok masyarakatnya, dan sebagainya. Dengan demikian, aktivitas politik tersebut tidak harus selalu bersifat politis, selama kegiatan tersebut berkaitan dengan politik dan berorientasi untuk mengetahui atau mempengaruhi kondisi sosial politik, maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai aktivitas politik. Dalam penelitiannya, Verba, Burns, dan Scholzman (1997) pun menambahkan kegiatan yang tidak politis sebagai indikator keterlibatan politik, yaitu penggunaan media dan diskusi politik.

Analisa terhadap aktivitas politik dilakukan oleh Voice and Equality (dalam Erhlich, 2000), kemudian Voice and Equality menggolongkan aktivitas politik ke dalam 9 jenis aktivitas, meliputi: kegiatan memilih (*voting*), berkampanye (*campaign work*), berkontribusi dalam kampanye (*campaign contributions*), menghubungi pemerintah (*contacting an official*), melakukan demonstrasi (*protests*), terlibat dalam kegiatan komunitas yang informal (*informal community work*), menjadi anggota *local board* (*membership on a local board*), berafiliasi pada parpol tertentu (*affiliation with a political organization*), dan berkontribusi terhadap aksi politik (*contribution to a political cause*).

Dari berbagai tinjauan di atas, aktivitas politik dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang untuk mempengaruhi kondisi sosial politik atau kebijakan pemerintahnya, baik melalui aktivitas yang bersifat politis mau pun tidak.

2.3. Dinamika Jenis Organisasi Kemahasiswaan dengan Tingkat Keterlibatan Politik (*Political Engagement*)

Keterlibatan politik seseorang dapat dihasilkan dari interaksinya dengan lingkungan, misalnya dengan orang tua, teman, sekolah, dan organisasi. Lingkungan tersebut menjadi media sosialisasi atau edukasi politik bagi individu

(Doise & Staerklé, 2002), serta media eksplorasi untuk pembentukan identitas diri, termasuk dalam dimensi politik (Marcia, 1993). Proses yang paling krusial untuk proses sosialisasi politik dan eksplorasi tersebut terjadi ketika seseorang berada pada masa remaja akhir (Marcia, 1993).

Di masa remaja akhir ini, media eksplorasi dan pembelajaran mengenai politik yang paling signifikan bagi remaja adalah organisasi karena di dalamnya individu akan mempelajari secara langsung berbagai keterampilan dan pemahaman yang berkaitan dengan politik, seperti kemampuan untuk bertukar gagasan, menyusun tujuan bersama, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut (Flanagan, 2004; Quintelier, 2008). Keterampilan-keterampilan tersebut merupakan proses politik yang sederhana dan serupa dengan berbagai proses demokrasi dalam konteks nyata.

Individu yang bergabung dalam organisasi yang berkaitan langsung dengan komunitas biasanya memiliki keterlibatan politik yang lebih tinggi karena ia akan mempelajari juga berbagai aturan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan komunitas tersebut (Flanagan, 2004). Ketika terdapat kebijakan pemerintah yang tidak dijalankan dengan baik, ia akan mempelajari kebijakan tersebut dan mencari cara untuk dapat mengadvokasi komunitasnya terhadap pemerintah agar kebijakan tersebut dapat dijalankan kembali dengan baik. Dengan demikian, sebagai warga negara ia akan langsung belajar untuk berhubungan dengan pemerintahan dan kebijakannya. Banyak tokoh politik di Amerika yang terlahir dari organisasi-organisasi sukarelawan dalam komunitas semacam ini, misalnya Barack Obama.

Tidak semua organisasi memiliki signifikansi yang sama terhadap keterlibatan politik individu. Dalam penelitian yang dilakukan Donovan, Bowler, Hanneman, dan Karp (2004) di New Zealand mengenai perbandingan berbagai jenis organisasi dan kaitannya dengan tingkat keterlibatan politik, ditemukan bahwa jenis organisasi yang berkaitan positif dengan tingkat keterlibatan politik di New Zealand adalah organisasi sukarelawan.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Quintelier (2008) di Belgia. Di negara tersebut, individu yang bergabung dalam organisasi

sukarelawan memiliki keterlibatan politik yang lebih tinggi daripada mereka yang tergabung dalam organisasi religius, etnik, dan kepemudaan. Menurutnya, hal ini terjadi karena mereka yang berada dalam organisasi yang berkaitan langsung dengan masalah sosial seperti organisasi sukarelawan akan dituntut untuk terlibat langsung dalam berbagai masalah sosial dan politik. Hasil penelitian Quintelier pun menunjukkan bahwa jumlah organisasi berkaitan pula dengan keterlibatan politik karena mereka yang terlibat dalam beberapa organisasi sekaligus diyakini akan memperoleh sosialisasi politik yang lebih banyak sehingga kemungkinannya untuk terlibat dalam politik menjadi lebih besar.

Hal berbeda justru terjadi dalam hasil penelitian Verba, Scholzman, dan Brady (1995) (dalam Donovan, Bowler, & Hanneman, 2003; Donovan, Bowler, Hanneman, & Karp, 2004) mengenai perbandingan berbagai jenis organisasi dan tingkat keterlibatan politik individu pada organisasi-organisasi tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Verba, Scholzman, dan Brady tersebut dilakukan di Amerika, dan kemudian ditemukan bahwa organisasi yang paling signifikan mempengaruhi tingkat keterlibatan politik warga Amerika adalah organisasi keagamaan atau organisasi gereja.

Dalam hasil penelitian Donovan, Bowler, dan Hanneman (2003), dikemukakan bahwa individu yang terlibat dalam organisasi non-politik dapat memiliki tingkat keterlibatan politik yang tinggi, hal ini terjadi karena individu yang bergabung dalam suatu organisasi –meskipun bukan organisasi politik, akan terbiasa dengan berbagai prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat sehingga dengan sendirinya ia memahami gagasan demokrasi dan akhirnya ia bersedia terlibat dalam kegiatan politik. Selain itu, individu pun akan mendapatkan berbagai informasi politik melalui interaksinya dengan anggota organisasi yang lain.

Berbagai penelitian di atas menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan politik individu pada berbagai jenis organisasi dapat berbeda, dan tingkat keterlibatan politik pada satu jenis organisasi di suatu negara dapat juga berbeda di negara lain. Di Indonesia, tepatnya di Universitas Indonesia, penelitian mengenai organisasi dan tingkat keterlibatan politik terhadap mahasiswa Universitas Indonesia ini

pernah dilakukan, hasilnya ternyata tidak terdapat hubungan yang signifikan antara organisasi dengan tingkat keterlibatan politik pada individu (Nurohman, 2007). Sayangnya penelitian ini tidak melakukan klasifikasi pada organisasi yang diikuti partisipannya sehingga tidak dapat dibandingkan antara tingkat keterlibatan organisasi pada satu jenis organisasi dengan di jenis organisasi lain.

Dikaitkan dengan dimensi organisasi yang menjadi unsur pembeda jenis organisasi (Munandar, 2001), peneliti berasumsi bahwa organisasi yang majemuk, formal, dan memiliki pembagian kewenangan kontrol yang tersebar (*decentralized*) seperti organisasi jenis matriks akan memiliki tingkat keterlibatan politik yang tinggi. Organisasi yang majemuk berarti memiliki keberagaman fungsi dan pembagian kerja yang kompleks dalam proses kerjanya untuk mencapai tujuan organisasi, formal berarti memiliki aturan yang baku yang harus diikuti para anggotanya, sementara pembagian kewenangan kontrol yang tersebar berarti bahwa kelompok kerja dalam organisasi tersebut tidak hanya dikontrol oleh satu orang saja.

Dalam organisasi seperti ini, para anggotanya akan lebih banyak terlibat dalam berbagai aturan dan batasan kerja yang secara tidak langsung mengenalkan individu pada bentuk aturan sosial yang juga berlaku dalam sebuah proses politik dan demokrasi. Sementara kemajemukan dalam kerja akan membuat individu terbiasa dengan heterogenitas dan kompleksitas kerja untuk mencapai sebuah tujuan bersama yang juga terjadi dalam sebuah proses politik. Sementara itu, kewenangan akan kontrol organisasi yang tidak terpusat akan membuat individu belajar mengenai proses pengambilan keputusan. Seluruh proses ini serupa dengan berbagai proses yang terjadi dalam demokrasi dan berbagai proses politik sehingga dapat dikatakan bahwa individu yang berada pada organisasi yang majemuk akan dididik untuk berpolitik secara sederhana.

Dalam organisasi yang lebih homogen seperti organisasi jenis sederhana yang tingkat kemajemukan atau kompleksitasnya lebih rendah, aturannya longgar, serta kontrolnya terpusat, berbagai proses yang sejalan dengan prinsip-prinsip politik dan demokrasi tersebut tidak banyak dirasakan oleh individu-individu yang menjadi pengurusnya. Peneliti berasumsi bahwa pada organisasi jenis ini, tingkat keterlibatan politik pada individu akan lebih rendah.

Dalam organisasi kemahasiswaan, contoh jenis organisasi matriks adalah organisasi replikasi pemerintahan seperti BEM UI, organisasi peminatan dalam bidang religi atau agama, serta organisasi ekstra-kampus,. Sementara organisasi-organisasi peminatan cenderung lebih homogen. Dengan demikian peneliti berasumsi bahwa anggota organisasi yang formal dan memiliki desain matriks seperti BEM UI memiliki tingkat keterlibatan politik yang lebih tinggi daripada organisasi-organisasi peminatan yang strukturalnya informal dan memiliki desain organisasi yang sederhana.

